

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

1. Pengaturan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pemenuhan hak konstitusional warga negara tentang kebutuhan listrik sebagai hak dasar terdapat pada peraturan perundangan-undangan yakni pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2004 tentang Rencana Umum ketenagalistrikan Daerah.
2. Faktor-faktor yang menghambat pemerintah daerah dalam memenuhi hak konstitusional warga negara tentang kebutuhan listrik sebagai hak dasar, yakni sebagai berikut :
 1. Kurang atau terbatasnya dana ataupun anggaran.
 2. Minimnya akses menuju ke lokasi-lokasi tertentu untuk memasang infrastruktur ketenagalistrikan.
 3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah tidak Up to date.

1.2 Saran

1. Pemerintah daerah di harapkan agar dapat merivisi Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2004 tentan Rencan Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) agar dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan penggunaan energi listrik untuk rakyat.

2. Di harapkan agar pemerintah daerah dapat mengoptimalkan lagi tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan terutama dalam bidang ketenagalistrikan dan dapat menangani faktor-faktor yang menghambat dalam melakukan pemenuhan kebutuhan penggunaan listrik oleh rakyat terutama dalam permasalahan dana ataupun anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Affandi Idrus. 1997. *Tata Negara*. Jakarta : Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Ali Zainudin, 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Palu : Sinar Grafika
- Asshiddiqie, Jimly, 2004. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Asshiddiqie Jimly. 2010. *Perihal Undang-Undang*, Jakarra : Rajawali Pers.
- Huda Ni'matul. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia edisi revisi*, Rajawali Pers : Jakarta
- Isfandyarie Anny, 2006. *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter*. Malang : Prestasi Pustaka Publisher
- Indonesia Ahlulbatbait. 2015. *Mengurai Persoalan Bangsa 70 Tahun Indonesia Merdeka Sebuah Agenda Penyelamatan*. Jakarta : Dewan Pengurus Pusat Ahlulbatbait Indonesia.
- Kansil C.S.T, dkk. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*. Jakarta : Jala Permata Aksara
- Marzuki Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Surabaya. Kencana
- Muhammad Fadel. 2014. *Payung Hukum Provinsi Gorontalo*. Gorontalo : Cipta Kreasi Indonesia
- Nugraha Safri Hukum. 2006. *Administrasi dan Good Governance*, Pidato pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap pada Universitas Indonesia, hlm.4
- Ridwan. 2002. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta. PT. Rajagrafindo Persada
- Ridwan Juniarso, Achmad Sodik Sudrajat. 2009. *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung : Nuansa Cendekia
- Sesung Rusdianto. 2013. *Hukum Otonomi Daerah*. Surabaya : Refika Aditama

Eddie Siregar. 2013. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan*

Rakyat Republik Indonesia. Jakarta : Sekretariat Jendral MPR RI

Suratman , Dilla H.Philips. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Alfabeta

Sunarno Siswanto. 2005. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Makassar: Sinar Grafika

Soekanto Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Press Jakarta

Tahir Arifin. 2011. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Gorontalo : PT.Pustaka Indonesia Press

Jurnal

Jurnal Hukum No.2 Vol.18 April 2011: 212 – 228218, hal 217

Jurnal konstitusi, Volume 6 Nomor 3, September 2009

Karya Ilmiah

Martinus Agus Hutoro, Tesis : *Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Anak Atas Identitas Diri Berupa Akta Kelahiran*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013

Undang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 tahun 2004 tentang Rencana

Umum Ketenagalistrikan Provinsi Gorontalo.

INTERNET

www.statistikketenagalistrikan2015.com. Diakses pada hari senin tanggal 29 Februari Pukul 11.05

<http://elsiusaragae.com>. Di akses pada hari minggu tanggal 28 Februari 2016.